

PENDIDIKAN MULTI KULTURAL BERBASIS KRISTIANI PADA SEKOLAH DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Ridwan Arke Rokot¹, Ismail Rahayu²

SMP Negeri 6 Ratahan¹, STAK Imanuel Bitung²

ridwanrokot98@admin.smp.belajar.id; cornelisrahayu@gmail.com

Diterima : 16/04/2025

Dipublikasi : 31/04/2025

Abstract: *Multicultural education is education about cultural diversity in responding to demographic and cultural changes in a particular community or even the world as a whole. This discourse on multicultural education is intended to respond to the phenomenon of ethnic, social, and cultural conflicts that often arise in the midst of a multicultural society.*

Qualitative research approach through library research using books as theoretical references. The nature of this research is descriptive-analytic by presenting problem data or a matter with proper interpretation and analysis. The data in this study are source books on the concept of multicultural education, scientific journals, online news and information on social activities. Theoretical and practical implications exist in the concept of religious moderation, a constructive theological approach, the culture of local community wisdom, symbols of religious harmony and the application of an independent curriculum for inclusive education in school institutions.

The conclusions of this research study, namely; a variety of more constructive interpretations of scriptures, understanding of multicultural education, diversity of beliefs in the plurality of society, the importance of religious moderation in the life of the nation and state, as well as developing inclusive curriculum in schools to realize justice and equality in education without differences in discrimination, race, gender, physically/mentally disabled, religious, social, economic, political and cultural.

Keywords: Multicultural Education, Christian, School, Society.

Abstrak: Pendidikan multikultural yaitu pendidikan tentang keragaman budaya dalam merespons perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Diskursus tentang pendidikan multikultural ini dimaksudkan untuk merespon fenomena konflik etnis, sosial, budaya yang kerap muncul ditengah-tengah masyarakat yang berwajah multikultural.

Pendekatan penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan buku-buku sebagai referensi teoritis. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptik-analitik dengan memaparkan data-data masalah atau suatu hal dengan interpretasi dan analisis yang tepat. Data pada penelitian ini, yaitu buku-buku sumber tentang konsep pendidikan multikultural, jurnal ilmiah, berita online dan informasi kegiatan sosial kemasyarakatan. Implikasi teoritis maupun praksis ada dalam konsep moderasi beragama, pendekatan teologis konstruktif, kebudayaan kearifan lokal masyarakat, simbol kerukunan hidup beragama dan penerapan kurikulum mandiri pendidikan inklusif di institusi sekolah.

Kesimpulan dari kajian penelitian ini, yaitu; Variasi penafsiran kitab suci yang lebih konstruktif, Pemahaman tentang pendidikan multikultural, Keragaman kepercayaan dalam kemajemukan masyarakat, Pentingnya moderasi bergama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengembangkan kurikulum inklusif disekolah-sekolah untuk mewujudkan keadilan dan persamaan dalam ketaraan pendidikan tanpa perbedaan diskriminasi, ras, gender, cacat fisik/mental, agama, sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Kata Kunci : Pendidikan Multikultural, Kristiani, Sekolah, Masyarakat.

Pendahuluan

Pendidikan kristen secara tradisional maupun pendidikan keagamaan pada umumnya masih berkuat dengan masalah klasik dalam hermeneutika atau ilmu penafsiran. Kesulitan menjembatani kesenjangan antara teks kitab suci yang berkonteks budaya kuno dan pembacanya yang berkonteks budaya modern yang hidup secara majemuk pada masyarakat transkultur dan multikultural seperti di Indonesia. Hal inilah yang membuat makna teks kuno sulit dipahami pembaca/pendengar modern. Tantangan ini muncul dari kesenjangan hermeneutis (*hermeneutical gap*), terutama jarak budaya yang sangat jauh antara teks kitab suci dan konteks pembaca modern. Apalagi, pembaca modern di sini selalu dipahami sebagai baik penafsir teks (pemberita teks) maupun pendengar pemberitaan teks yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda. Di samping beberapa keberatan terhadap beberapa referensi yang sudah ada ini, masih ada masalah klasik lain yang cukup penting dalam hermeneutika Alkitab modern: bagaimana menjembatani kesenjangan hermeneutis (*hermeneutical gap*) antara teks sebagai produk masa lampau dan konteks pembaca masa kini.¹

Implikasi dari usaha-usaha untuk memasukan konteks kekinian kedalam teks asli telah menghasilkan differensiasi pemahaman teologis yang sangat tajam antara kaum injili dan eukemenikal dimana, penekanan terhadap satu kutub mengakibatkan pengabaian terhadap kutub yang lain, dan sebaliknya. Contoh yang nyata dapat dilihat dalam ketegangan yang muncul, khususnya dalam metode hermeneutis yang dipakai oleh kelompok ekumenikal dan evangelikal. Hal ini kemudian, berimbas pada bagaimana cara masing-masing menjalankan misi dan kontekstualisasi injil dalam pendidikan kristen itu sendiri. Gerakan ekumenikal lebih menekankan usaha kontekstualisasi yang berangkat dari konteks. Sementara itu, gerakan evangelikal (Injili) lebih menekankan usaha kontekstualisasi yang berangkat dari teks.²

Pertanyaan-pertanyaan pokok yang muncul dalam gerakan ini adalah bagaimana bahasa Alkitab dapat berbicara kepada pendengar modern? Bagaimana firman Allah itu menjadi firman "hidup" dan didengar secara baru? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bukan hal yang mudah, sebab antara teks dan pendengar terdapat jurang pemisah yang sangat lebar dan bersifat multidimensi, misalnya perbedaan dalam waktu, bahasa, dan kebudayaan. Adapun masalah ini sangat luas dan sulit diatasi, masih ada semacam optimisme bahwa kesenjangan ini masih dapat dijembatani. Ada beberapa pendapat yang setuju dengan hal ini muncul secara beragam, misalnya pendapat yang mengatakan bahwa walaupun frasa tradisional (baca: teks-teks kuno) itu diucapkan secara literal dan dalam konteks sejarah tertentu di masa lampau, tidak berarti hal tersebut hanya

¹ Grant Osborne, *The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction to Biblical Interpretation* (Downers Grove: Inter Varsity, 1991).

² Wilson Chow, "Biblical Foundation: An East Asian Study," *Evangelical Review of Theology* 7, no. 1 (1983), 106.

diperuntukkan untuk masa lampau.³

Teks-teks kuno ini masih dapat berbicara dan berhubungan dengan masa kini juga. Selanjutnya, ada pendapat lain mengatakan bahwa kata yang sama (dari teks- teks Alkitab) dapat disampaikan untuk waktu atau kesempatan yang berbeda, dan dapat disampaikan dengan cara berbeda. Intinya, meskipun waktu dan kemasan berbeda, isi masih tetap sama.

Implikasi memasukan ide-ide pemikiran kontemporer kedalam kitab suci telah menciptakan disparitas kekristenan antara dunia akademisi teologi dengan dogma Iman gerejani. Usaha yang paling ekstrem untuk menjembatani kesenjangan antara teks kuno dengan pendengar modern telah dilakukan oleh Rudolf Bultmann dengan program demitologisasinya. Program ini merupakan sebuah rekonstruksi radikal, yang muncul dari pemahaman bahwa manusia saintifikmodern secara sederhana tidak dapat menerima pendeskripsian tradisional tentang hal-hal yang bersifat natural-supranatural.⁴ Pendapat ini menolak dari awal setiap tafsiran literal atau tradisional terhadap psikologi dan kosmologi Alkitab, sebab semua ini dianggap sudah ketinggalan zaman bagi manusia saintifik modern. Implikasinya, ada semacam usaha untuk menghilangkan unsur-unsur supranatural di dalam cerita-cerita injil yang dianggap sebagai mitos yang telah dikembangkan oleh orang-orang pada abad pertama.

Usaha penafsiran makna teks dalam kekristenan inilah yang melahirkan begitu banyak variasi pandangan akademis teologis maupun dogmatika iman gereja yang berbeda satu-sama lainnya. Profil masyarakat gereja sebagai komunitas iman akan terlihat dari aspek pendidikannya berdasarkan pengaruh teks maupun kontekstual yang membentuknya. Indikasinya, masyarakat gereja sebagai masyarakat belajar (*Learning Society*) yang mampu hidup harmoni serta interaktif dengan sesama dalam perbedaan sebagai hal yang konstruktif, atau sebaliknya sebagai masyarakat gereja menjadi eksklusif yang teralienasi dalam perbedaan sebagai hal yang dekonstruktif.

Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang memanfaatkan keberagaman siswa dari aspek budaya, etnis, agama dan kepercayaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang termaktub dalam UU Sisdiknas (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional) tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.⁵ Pendidikan multikultural merupakan pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan dan budaya masyarakat secara menyeluruh juga untuk memperbaiki kekurangan dan kegagalan, serta membongkar praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan.

³ Wolfhart Pannenberg, *Basic Questions in Theology* (London: SCM, 1970), 1:9.

⁴ Rudolf Bultmann, *Kerygma and Myth*, terj. Hans Werner Bartsch (New York: Harper and Row, 1961).

⁵ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*. Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Cetakan Ketiga (2009).

Pilihan fokus dalam pendekatan pendidikan multikultural (usia, kelas, budaya, suku, kekhususan, gender, kebenaran sejarah, bahasa, ras, agama, orientasi seksual, dan kelas sosial) tergantung pada bahasa, konteks sosial politik (kebijakan sekolah), jenis sekolah), harapan guru, dan persiapan guru. Hasil penelitian Arslan & Rață menemukan bahwa beragam definisi pendidikan multikultural yang berfokus pada: 1) iklim kelas inklusif, 2) kurikulum beragam, 3) perubahan sosial melalui pendidikan, dan 4) isu sistemik pendidikan.⁶ Pendidikan multikultural menggabungkan gagasan bahwa semua siswa, terlepas dari kelas sosial, ras, etnis, agama atau karakteristik gender mereka, harus memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama untuk belajar.

Sekolah harus hati-hati memeriksa ide dan mengajar siswa mereka dalam semua ide, nilai, ritual, dan upacara.⁷ Dari perspektif ini, pendidikan multikultural dilaksanakan untuk meningkatkan toleransi, rasa hormat, pemahaman, kesadaran, dan penerimaan diri sendiri dan orang lain dalam keragaman budaya di lingkungan sekolah.⁸ Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang merata bagi semua peserta didik tanpa memandang latar belakang suku dan budaya atau agama yang dianut.

Tujuan pendidikan multikultural didefinisikan oleh Gollnick & Chinn, bahwa mempromosikan kekuatan dan nilai keragaman budaya, mengangkat hak asasi manusia dan menghormati mereka yang berbeda dari dirinya sendiri, mengutamakan kesetaraan dalam distribusi kekuasaan dan pendapatan di antara kelompok-kelompok, memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan bagi semua orang, dan mengutamakan pilihan hidup alternatif bagi orang-orang.⁹ Bennett mengemukakan pendapatnya, bahwa tujuan utama pendidikan multikultural adalah pengembangan intelektual, sosial, dan pertumbuhan pribadi semua siswa ke potensi tertinggi mereka dan penghapusan stereotip melalui pengurangan rasisme dan kefanatikan.¹⁰

Konsep tujuan pendidikan multikultural menurut Sleeter & Grant, ialah;

- 1) Peningkatan kemampuan individu dalam berinteraksi di lingkungan beragam.
- 2) Pengembangan pemahaman terhadap faktor sosial, politik, dan ekonomi lintas budaya.
- 3) Penegasan dan apresiasi terhadap semua budaya.
- 4) Pengalaman dan pengakuan budaya lain sebagai sumber belajar.
- 5) Penguatan identitas pribadi melalui kesadaran warisan budaya.

⁶ Hasan, A and Rață, G. *Multicultural Education: From Theory to Practice*, Cambridge Scholars Publishing (2013)p.10-11.

⁷ Hasan, A. Educational Policy vs. Culturally Sensitive Programs in Turkish Educational System. *International Journal of Progressive Education* 5 (2): 16. (2009).

⁸ J. J. Irvine. *Culturally Responsive Teaching: Lesson Planning for Elementary and Middle Grades*. New York, NY: McGraw Hill. (2001).

⁹ Donna M. Gollnick, & P. C. Chinn, *Multicultural Education in a Pluralistic Society*. New York, NY: Macmillan. (1990).

¹⁰ Christine I. Bennett. *Comprehensive Multicultural Education Theory and Practice*. Boston: Allyn & Bacon. (1995).

- 6) Peningkatan toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan nilai, sikap, dan perilaku.¹¹

Meningkatnya polarisasi masyarakat manusia antara golongan kaya dan miskin tidak hanya menambah polarisasi ekonomi tetapi juga agama, ras, etnis, politik, dan seksual: faktor-faktor demografis yang berubah ini membutuhkan pendidikan multikultural untuk menjaga masyarakat tetap demokratis, bebas dan damai. Etnosentrisme dan semakin banyaknya anak-anak penyandang disabilitas membuat pendidikan multikultural perlu dilakukan. Baruth & Manning mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi munculnya pendidikan multikultural:

- 1) Pergerakan hak warga sipil;
- 2) Peningkatan kesadaran etnis;
- 3) Analisis yang lebih kritis terhadap buku teks dan materi lainnya;
- 4) Hilangnya kepercayaan pada teori deprivasi budaya.¹²

Pendidikan multikultural memiliki beberapa karakteristik yang menyatukan siswa dalam lingkungan pendidikan dan memberdayakan perdamaian dan kebebasan dalam masyarakat. Ovando (1998b) dan Nieto (1996) menjelaskan beberapa karakteristik kunci dari pendidikan multikultural dalam masyarakat kita:

1. Pendidikan multikultural merupakan proses yang berkelanjutan dan dinamis;
2. Pendidikan multikultural adalah pedagogi kritis karena baik siswa maupun guru yang terlibat dalam proses belajar-mengajar multikultural tidak memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang netral dan apolitis;
3. Pendidikan multikultural bersifat antirasisme;
4. Pendidikan multikultural adalah dasar karena, bersama dengan disiplin lain, itu merupakan komponen integral dari pendidikan;
5. Pendidikan multikultural meresap dalam proses persekolahan secara keseluruhan;
6. Pendidikan multikultural sangat penting bagi siswa mayoritas dan minoritas;
7. Pendidikan multikultural bertujuan untuk keadilan sekolah.¹³

Pendidikan multikultural sangat erat kaitannya dengan konsep moderasi beragama. Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan

¹¹ C. E. Sleeter, & C. A. Grant. *Making Choices for Multicultural Education: Five Approaches to Race, Class, And Gender*. Columbus, OH: Merrill. (1993).

¹² L. G. Baruth, & M. L. Manning. *Multicultural Education of Children and Adolescents*. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. (1992).

¹³ C. J. Ovando, & McLaren, P. (Eds.). *The Politics of Multiculturalism and Bilingual Education: Students and Teachers Caught in the Cross Fire*. Boston, MA: McGraw-Hill Higher Education. (1998).

dengan institusi negara.¹⁴ Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku, selalu mengambil posisi ditengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama.

Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal.¹⁵ Sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan.

Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Mohammad Hashim Kamali menjelaskan bahwa, prinsip keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) dalam konsep moderasi (*wasathiyah*) beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu¹⁶. Moderasi bergama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting. Ada tiga alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama: *Pertama*, martabat manusia; *Kedua*, mengelola keberagaman dan potensi fanatisme akibat multitafsir agama, dan *Ketiga*, merawat keindonesiaan yang heterogen berdasarkan Pancasila.¹⁷ Indonesia sebagai negara yang tidak berbasis agama namun juga tidak sekuler memerlukan moderasi untuk menjaga persatuan dalam keberagaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian dalam bentuk kajian teoretis terhadap suatu kebijakan atas fenomena yang ada. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptik-analitik dengan memaparkan data-data masalah atau suatu hal dengan interpretasi dan analisis yang tepat.¹⁸ Data pada penelitian ini, yaitu buku-buku sumber tentang konsep pendidikan multikultural, jurnal ilmiah, berita *online* dan informasi kegiatan sosial masyarakat. Teknik analisa data yang dilakukan pada riset ini, yaitu; interpretasi dan analisis konten terhadap konsep, gagasan, teori atau fenomena social sebagai informasi fakta dilapangan.

¹⁴ Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI Jl.MH. Thamrin No.6 Lt. 2 Jakarta Pusat (2019).

¹⁵ Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. (2019).

¹⁶ Kamali, Mohammad Hasyim, 2015. *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur'anic Principle of Wasathiyah*. Oxford: Oxford University Press.

¹⁷ *Ibid*, Hal.8-10.

¹⁸ Sutrisno Hadi, (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Pembahasan Hasil Penelitian

Moderasi Beragama

Dari uraian diatas, konsep dan praktik pendidikan multikultural pada masyarakat Indonesia sudah hadir dalam sejarah kehidupan masyarakat Minahasa Tenggara. Implikasi teoritis maupun praksis ada dalam konsep moderasi beragama, pendekatan teologis konstruktif,¹⁹ kebudayaan kearifan lokal masyarakat,²⁰ simbol kerukunan hidup beragama dan penerapan kurikulum mandiri pendidikan inklusif di institusi sekolah.²¹ Moderasi beragama, secara esensial untuk harmoni internal dan eksternal agama di Indonesia. Konteks Kristiani terpusat pada Tuhan Yesus Kristus sebagai pembawa damai, kuncinya adalah intensitas interaksi antar kelompok.

Dalam Alkitab tidak sedikit ayat yang mengajarkan cita-cita untuk mewujudkan kedamaian di muka bumi ini. Kata kunci yang digunakan dalam Alkitab ketika berbicara tentang konteks kedamaian di antaranya menggunakan kata kebebasan, hak, hukum, kedamaian, memaafkan/mengampuni, kejujuran, keadilan, dan kebenaran.²² Dialog dengan umat beragama lain, gereja juga harus tetap bersikap jujur terhadap identitasnya. Gereja harus tetap jujur mengatakan siapa Yesus sebenarnya.²³ Dialog antar umat beragama di Indonesia sangat penting untuk dilaksanakan. Selain dapat menjadi alat bagi penginjilan secara sosial, dialog juga akan dapat menjadi jembatan bagi kerukunan dan kerjasama yang baik antar-umat beragama.

Pendekatan Teologi Kristen Konstruktif untuk Dunia Pluralistik.

Aspek pemikiran teologi Kristen harus mampu membuka ruang untuk hadirnya suatu pendidikan multikultural. Kärkkäinen berdialog dengan penelitian ilmiah alam dan sosial saat ini dan, khususnya, studi perbandingan agama-agama untuk merajut presentasi unik tentang bagaimana teologi Kristen harus dilakukan di dunia kontemporer kita yang pluralistik.²⁴ Oleh sebab itu, usaha-usaha pemikiran mutakhir seperti ini sebagai tindakan yang membuka cakrawala pemikiran masyarakat kristiani untuk mengartikulasi imannya, melalui pendidikan multikultural yang dapat menjembatani dialog konstruktif dengan sesama dalam budaya dan kepercayaan agama yang

¹⁹ Veli-Matti Christ Kärkkäinen, "Hope and Community: A Constructive Christian Theology for the Pluralistic World. A Constructive Christian Theology for the Pluralistic World. Grand Rapids, Michigan: William B" (Eerdmans Publishing Company, 2017).

²⁰ J. J. Tangkudung, J. P. M., Senduk, "Mapalus Arisan Sebagai Salah Satu Model Kearifan Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3, no. 2 (2016): 107-23.

²¹ Michael Gultom, Junifrius & Krissusanto, *Misi Inklusif: Berjumpa Dengan Firman Dan Realitas Untuk Misi Yang Inklusif* (Jakarta: BETHEL PRESS Unit Penerbitan dan Literatur: STTBI, 2017).

²² John L Elias, "Education for Peace and Justice," *Catholic Education: A Journal of Inquiry and Practice* 9, no. 2 (2005).

²³ Gultom, Junifrius & Krissusanto, *Misi Inklusif: Berjumpa Dengan Firman Dan Realitas Untuk Misi Yang Inklusif*.

²⁴ Kärkkäinen, "Hope and Community: A Constructive Christian Theology for the Pluralistic World. A Constructive Christian Theology for the Pluralistic World. Grand Rapids, Michigan: William B."

berbeda satu sama lainnya.

Pendidik agama Kristen memiliki alasan yang kuat untuk komitmen terlibat secara publik dalam pendidikan untuk perdamaian dan keadilan. Selanjutnya, bagi para pendidik Katolik ada tradisi yang kaya dari ajaran sosial Gereja yang berakar pada Kitab Suci dan tradisi Gereja. Kitab-Kitab Ibrani, khususnya nabi Yesaya dan Amos, sangat menekankan upaya perdamaian dan keadilan. Kitab Suci Kristen menyajikan teladan Yesus yang bekerja keras untuk mewujudkan pemerintahan keadilan dan mencapai perdamaian yang melampaui pemahaman.²⁵ Agama memberikan visi yang berorientasi spiritual tentang masyarakat yang adil serta motivasi tambahan untuk mencapainya dalam bentuk simbol, contoh, tulisan, dan nasihat.

Ada banyak pendidik agama telah menjadikan pendidikan untuk perdamaian dan keadilan sebagai pusat teori dan proposal pendidikan mereka. Masalah pendidikan menyangkut diskusi tentang bagaimana mendidik keadilan secara adil, mobilisasi komunitas Kristen akar rumput untuk pendidikan tersebut, dan pengembangan materi kurikuler. Isu-isu yang lebih luas dalam pelayanan Kristen juga termasuk: peran liturgi, pendampingan dan konseling pastoral, hubungan antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial, dan peran seni dalam pendidikan semacam itu.²⁶ Dari perspektif ini, pendidikan keagamaan Kristen yang berasal dari pendidikan teologi dan penafsiran kitab suci perlu mengembangkan suatu sistem pemikiran teologis konstruktif, partisipatif dan dialogis dalam merangkul perbedaan keragaman menjadi kekayaan harmoni kehidupan beriman.

Sejarah Suku dan Kebudayaan Majemuk di Minahasa Tenggara.

Penduduk Ratahan datang bergelombang baik yang dari Tontemboan (Minahasa), maupun pendatang dari seberang daratan baik dari Utara maupun dari Selatan. Dalam kisah Minahasa kuno, ada kelompok Tou-Ure yang menetap di pegunungan dan terpisah dari musyawarah pembentukan persatuan "Mahasa" di Batu Pinawetengan abad ke-7. Seiring waktu, struktur wilayah Minahasa berubah, hingga pada masa Belanda, Ratahan menjadi bagian dari Pakasa'an Touwuntu. Awalnya, sekitar abad ke-4 atau ke-5, wilayah utara Ratahan menjadi tempat pertemuan suku-suku berbeda bahasa yang membentuk persekutuan merdeka. Ratahan baru bergabung dengan perserikatan Minahasa sekitar tahun 1690.²⁷ Walak dan Pakasa'an Wilayah walak Toulour agak lain karena selain meliputi daratan juga membahagi danau Tondano antara sub-walak Tounour yakni Touliang dan Toulimambot.

Pakasa'an adalah walak Bantik yang tersebar di Malalayang, Kema dan Ratahan bahkan ada di Mongondouw-walaupun etnis Bantik juga keturunan Toar dan Lumimuut. Menurut legenda etnis Bantik jaman lampau terlambat datang pada musyawarah di batu Pinawetengan. Ada tiga nama dotu Muntu-

²⁵ John L. Elias, *Education for Peace and Justice*. Catholic Education: A Journal of Inquiry and Practice. Article 8. Volume 9. Issue 2. 12-01-2005

²⁶ *Ibid*, p165-166.

²⁷ Jessy Wenas, *Sejarah Dan Kebudayaan Minahasa* (Institut Seni Budaya Sulawesi Utara, 2007).

Untu dalam legenda Minahasa yakni Muntu-Untu abad ke-7 asal Tounkimbut (Tontemboan). Muntu-Untu abad 12 asal Tonsea-menurut istilah Tonsea. Dan Muntu-Untu abad 15 jaman Spanyol berarti ada tiga kali musyawarah besar di batu Pinawetengan untuk berikrar agar tetap bersatu.²⁸ Keberadaan suku-suku di minahasa tenggara yang terdiri dari suku pasan, suku ponosakan, suku tonsawang dan suku bantik. Keragaman etnik budaya dan kepercayaan agama yang berbeda satu dengan yang lain, adalah modal sosial dalam membangun harmoni kehidupan. Hal ini adalah manifestasi dari nilai-nilai pendidikan multikultural khas kabupaten minahasa tenggara yang sudah terbangun lama dalam sejarah perkembangan budaya minahasa pada umumnya.

Kebudayaan Mapalus dari tradisi gotong royong Minahasa, memiliki pembagian peran: wanita membawa alat pertanian, pria menjaga keamanan dengan senjata. Pemimpin Mapalus dipilih dan 'dicambuk' sebagai simbol ketegasan dalam menegakkan aturan. Makna Mapalus bergeser dari kerja komunal kepemilikan lahan bersama menjadi saling membantu seiring perkembangan masyarakat.²⁹ Oleh sebab itu, setiap anggota *Mapalus* berhak untuk mendapatkan bantuan dari anggota lain sebagai layanan karena ia telah membantu anggota lainnya dengan melakukan pekerjaan di sawah, ladang serta rumah, arisan bangunan, arisan catering dan komunitas sosial lainnya³⁰. Prinsip kearifan lokal ini berlaku secara umum pada masyarakat suku-suku di minahasa tenggara, termasuk dengan hubungan relasi yang baik antar sesama golongan agama kepercayaan yang ada, misalnya kerja sama mapalus arisan membangun rumah, arisan acara adat dan pernikahan dapat terjalin kerja sama antar anggota yang beragama kristen maupun islam yang berdomisili di Kecamatan Belang, Kecamatan Posumaen dan Kecamatan Ratatotok.

Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan penghargaan bagi lima desa di wilayah Minanga Raya di Kecamatan Pusomaen. Desa-desa tersebut dianggap sebagai desa paling menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Minahasa Tenggara. Kelima desa ini yaitu, Minanga, Minanga Timur, Minanga Satu, Minanga Dua, dan Minanga Tiga. "Ini merupakan penghargaan yang luar bagi masyarakat dan pemerintah desa yang ada di Minanga Raya, karena mampu menjaga kerukunan antar umat beragama," kata Wakil Bupati Minahasa Tenggara Joke Legi di Minanga, Kamis (2/12/2021). Ia mengungkapkan, penghargaan yang diberikan Kementerian Agama bagi kelima desa ini harus menjadi contoh bagi desa-desa lainya di Minahasa Tenggara. "Kerukunan antar umat beragama harus dibina secara baik, bahkan terus menerus meski ada perbedaan. Perbedaan itu adalah keindahan," ujarnya. Lebih lanjut kata Joke, toleransi dan kebersamaan menjadi nilai luhur dalam kebhinekaan. "Semua

²⁸ <http://minhasanet.blogspot.com/2010/06/sejarah-minahasa-tenggara.html>. Diakses Tanggal 15 Februari 2022

²⁹ Thelma Wawointana, *Mapalus Dan Pengembangan Kebudayaan Nasional*, ed. Upe Ambo, vol. 15 (Kendari: Literacy Institute, 2020).

³⁰ http://p2k.unhamzah.ac.id/en1/2-3073-2970/Rataan-Minahasa-Tenggara_82925_p2k-unhamzah.html. Di akses tanggal 15 Februari 2022

aspek kehidupan harus saling menopang, khususnya di desa, tokoh agama harus menciptakan kerukunan antar umat beragama secara berkelanjutan. Menjaga kerukunan menjadi tanggung jawab dari seluruh komponen masyarakat," tandasnya.

Tidak ada yang dibeda-bedakan, jika ada acara suka dan duka semua warga saling bergotong royong tanpa memandang dia berasal dari agama atau golongan apa pun," katanya. Lebih lanjut dia mengungkapkan, masyarakat mengutamakan untuk saling menjaga toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. "Ini juga didukung oleh para tokoh-tokoh agama, yang ikut mengajak masyarakat saling bertoleransi," jelas Hukum Tua Minanga ini

Sementara itu Anggota DPRD Minahasa Tenggara Rasni Pontororing mengungkapkan, kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Minanga Raya merupakan warisan dari para orang tua.

"Sejak dulu orang tua kami sudah mengajarkan hidup rukun, meski berbeda agama. Ini yang kami jaga dan pelihara," kata Rasni.

Bahkan ia mengungkapkan jika ada perayaan Natal maupun Idul Fitri, seluruh warga saling bersilaturahmi kepada sanak saudara dan kerabat. "Baik warga Kristen maupun Islam sama merayakan hari besar keagamaan," jelasnya.

Selain itu secara bersama-sama warga di Minanga Raya anti terhadap radikalisme, maupun paham yang memecah belah kehidupan bermasyarakat.

"Kami warga yang terbuka. Namun jika ada yang datang dengan paham yang ingin mengganggu kehidupan kerukunan antar umat beragama, maka kami akan bersama-sama menolak, karena kami tidak mau ada perpecahan," tandasnya.

Kabupaten Minahasa Tenggara (Mittra) adalah salah satu Kabupaten di antara 15 Kabupaten/Kota (11 Kabupaten dan 4 Kota) yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Ratahan, berjarak sekitar 80 km dari Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki 12 kecamatan, 9 kelurahan dan 135 desa (dari total 171 kecamatan, 332 kelurahan dan 1.507 desa di seluruh Sulawesi Utara). Luas wilayah Minahasa Tenggara adalah 710,83 km². Saat ini Kabupaten Minahasa Tenggara dipimpin Bupati Mittra James Sumendap dan Wakil Bupati Jesaja Jocke Legi³¹.

Pendidikan Multikultural/Pendidikan Inklusif di Institusi Sekolah.

Pendidikan inklusif menjamin hak semua anak berkebutuhan khusus atas pendidikan bermutu, sesuai UU Sisdiknas. Prinsip UDL diterapkan agar pembelajaran fleksibel, bermakna, dan melibatkan semua. Sekolah, seperti SMPN 6 Ratahan, menyusun KTSP inklusif berdasarkan analisis konteks dan kebutuhan siswa ABK. Pelaksanaan KTSP juga mempertimbangkan kondisi terkini, seperti pandemi Covid-19, dengan penyesuaian pembelajaran dan protokol kesehatan, menuju pembelajaran tatap muka.

Dengan tersusunnya dokumen KTSP kurikulum inklusif ABK ini, SMP

³¹ <https://manado.tribunnews.com/2021/12/02/minanga-raya-didaulat-wilayah-paling-rukun-di-kabupaten-mittra?page=3>. Di akses pada tanggal 16 Februari 2022

Negeri 6 Ratahan akan menjadi sekolah yang memiliki kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristi, kondisi peserta didik dan lingkungan sekolah, sehingga terselenggara proses pendidikan yang berbasis kurikulum Inklusif dan dengan mengembangkan berbagai keunggulan-keunggulan lokal. Kondisi Ideal yang diharapkan tercapai di SMP Negeri 6 Ratahan adalah kesetaraan pendidikan dan terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan hasil pendidikan yang bermutu pula dapat tercapai. Namun demikian, kondisi nyata saat ini SMP Negeri 6 Ratahan masih harus terus berbenah dan mengupayakan pemenuhan 8 Standar Pendidikan³²

Satuan pendidikan merupakan pusat pengembangan budaya. kurikulum ini mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai satu kesatuan kegiatan pendidikan yang terjadi di sekolah. Nilai-nilai yang dimaksud di antaranya: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial dan lingkungan, serta tanggung jawab. Nilai-nilai melingkupi dan terintegrasi dalam seluruh kegiatan pendidikan sebagai budaya sekolah.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian konseptual dan faktual diatas tentang pendidikan multikultural, dapat disimpulkan secara tentatif :

1. Variasi penafsiran kitab suci sangat mempengaruhi pendirian dogmatis dan karakter sosial warga gereja sebagai anggota masyarakat.
2. Pemahaman tentang wawasan kebangsaan, keadilan sosial, HAM, Demokrasi, Kekayaan Budaya, Keragaman Kepercayaan dan Kemajemukan masyarakat sangat penting untuk membangun konstruksi pendidikan Multikultural.
3. Pentingnya moderasi bergama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui dialog antar umat beragama, bakti sosial dan komunitas antar umat agama untuk memperat hubungan persaudaraan dalam semangat nasionalisme pada warga masyarakat yang pluralis.
4. Menjaga dan melestarikan sejarah kebudayaan dan nilai-nilai Kearifan lokal sebagai perekat dan simbol kerukunan hidup antar umat beragama sebagai kekayaan hidup bangsa Indonesia.
5. Mengembangkan Kurikulum Inklusif disekolah-sekolah untuk mewujudkan keadilan dan persamaan dalam ketaraan pendidikan tanpa perbedaan diskriminasi, ras, gender, cacat fisik/mental, agama, sosial, ekonomi, politik dan budaya.

³² Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Kurikulum 2013 : Kurikulum dan Pendidikan Inklusif SMPN 6 Ratahan. Kabupaten Minahasa Tenggara. Tahun Pelajaran 2021/2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Baruth, L. G. & Manning, M. L. *Multicultural Education of Children and Adolescents*. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. (1992).
- Bennett, Christine I. *Comprehensive Multicultural Education Theory and Practice*. Boston: Allyn & Bacon. (1995).
- Bultmann, R. *Kerygma and Myth*, terj. Hans Werner Bartsch (New York: Harper and Row, 1961).
- C. E. Sleeter, & C. A. Grant. *Making Choices for Multicultural Education: Five Approaches to Race, Class, And Gender*. Columbus, OH: Merrill. (1993).
- Chow, W. "Biblical Foundation: An East Asian Study," *Evangelical Review of Theology* 7, no. 1 (1983), 106.
- Elias, John L. *Education for Peace and Justice*. Catholic Education: A Journal of Inquiry and Practice. Article 8. Volume 9. Issue 2. 1201-2005.
- Gultom, Junifrius & Krissusanto, *Misi Inklusif: Berjumpa Dengan Firman Dan Realitas Untuk Misi Yang Inklusif*.
- Gollnick, Donna M., & Chinn, P. C. *Multicultural Education in a Pluralistic Society*. New York, NY: Macmillan. (1990).
- Hadi, S. (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasan, A. Educational Policy vs. Culturally Sensitive Programs in Turkish Educational System. *International Journal of Progressive Education* 5 (2): 16. (2009).
- Hasan, A and Rață, G. *Multicultural Education: From Theory to Practice*, Cambridge Scholars Publishing (2013)p.10-11.
- Irvine, J.J. *Culturally Responsive Teaching: Lesson Planning for Elementary and Middle Grades*. New York, NY: McGraw Hill. (2001).
- J. J. Tangkudung, J. P. M., Senduk, "Mapalus Arisan Sebagai Salah Satu Model Kearifan Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3, no. 2 (2016): 107-23.
- Jessy Wenas, *Sejarah Dan Kebudayaan Minahasa* (Institut Seni Budaya Sulawesi Utara, 2007).
- John L Elias, "Education for Peace and Justice," *Catholic Education: A Journal of Inquiry and Practice* 9, no. 2 (2005).
- Kamali, Mohammad Hasyim. *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur'anic Principle of Wasathiyah*. Oxford: Oxford University Press (2015).
- Kärkkäinen, Veli-Matti Hope and Community: A Constructive Christian Theology for the Pluralistic, Vol. 5. (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Press, 2017).
- Mahfud, C. *Pendidikan Multikultural*. Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Cetakan Ketiga (2009).
- Michael Gultom, Junifrius & Krissusanto, *Misi Inklusif: Berjumpa Dengan Firman Dan Realitas Untuk Misi Yang Inklusif* (Jakarta: BETHEL PRESS Unit Penerbitan dan Literatur: STTBI, 2017).
- Osborne, G *The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction to Biblical Interpretation* (Downers Grove: Inter Varsity, 1991).
- Ovando, C. J. & McLaren, P. (Eds.). *The Politics of Multiculturalism and Bilingual Education: Students and Teachers Caught in the Cross Fire*.

- Boston, MA: McGraw-Hill Higher Education. (1998b).
- Pannenberg, W. *Basic Questions in Theology* (London: SCM, 1970), 1:9 Sleeter, C. E. & Grant, C. A. *Making Choices for Multicultural Education: Five Approaches to Race, Class, And Gender*. Columbus, OH: Merrill. (1993)
- Kementrian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI. Jl. MH. Thamrin No.6 Lt. 2 Jakarta Pusat (2019).
- Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Kurikulum 2013 : Kurikulum dan Pendidikan Inklusif SMPN 6 Ratahan. Kabupaten Minahasa Tenggara. Tahun Pelajaran 2021/2022.
- Veli-Matti Christ Kärkkäinen, *Hope and Community: A Constructive Christian Theology for the Pluralistic World. A Constructive Christian Theology for the Pluralistic World*. Grand Rapids, Michigan: William B" (Eerdmans Publishing Company, 2017).
- <http://minahasanet.blogspot.com/2010/06/sejarah-minahasa-tenggara.html>. Diakses Tanggal 15 Februari 2022
- http://p2k.unhamzah.ac.id/en1/2-3073-2970/Ratahan-Minahasa-Tenggara_82925_p2k-unhamzah.html. Di akses tanggal 15 Februari 2022
- <https://manado.tribunnews.com/2021/12/02/minanga-roya-didaulat-wilayah-paling-rukun-di-kabupaten-mitra?page=3>. Di akses pada tanggal 16 Februari 2022